

**Analisis Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya
Pembangunan Lingkungan Di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem,
Kabupaten Dairi**

Joy Pramanta Sembiring¹, Vera Pasaribu², Jonson Rajagukguk³

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

²Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

³Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail: joy.sembiring@student.uhn.ac.id¹, verapasaribu@uhn.ac.id²,
jonson.rajagukguk@uhn.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of public service performance in waste management and to identify the factors that influence both the success and the obstacles in implementing waste management policies in Lau Tawar Village, Tanah Pinem Sub-district, Dairi Regency. Waste-related issues at the village level are not only associated with technical aspects but also concern public awareness, policy support, and the availability of facilities and infrastructure.

This research employs a qualitative approach using in-depth interviews with village officials, community members, and business actors, supported by direct field observations.

The findings reveal that the quality of public service performance in waste management in Lau Tawar Village is still at a developing stage. In terms of efficiency, village resources have been utilized through village fund allocation and community self-help activities. In terms of effectiveness, village government efforts in conducting socialization and encouraging community participation have raised awareness among some residents. The responsiveness of the village government is reflected in the commitment and direct involvement of village officials in engaging the community, although the community's responses remain varied. In terms of equity, waste management services have not yet been evenly distributed, as only a portion of residents have received adequate service.

These findings indicate that to improve public service performance in waste management, sufficient budget support, improved facilities, more intensive socialization, and stronger collaboration *between the village government, the community, and the regional government are required.*

Keywords: Public Service, Waste Management, Village Government Performance, Community Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Permasalahan sampah di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada perangkat desa, masyarakat, dan pelaku usaha, serta didukung dengan observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar masih berada pada tahap berkembang. Dari sisi

efisiensi, pemanfaatan sumber daya desa sudah dilakukan melalui alokasi dana desa dan kegiatan gotong royong. Dari sisi efektivitas, upaya pemerintah desa dalam sosialisasi dan ajakan gotong royong telah meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat. Responsivitas pemerintah desa terlihat dari komitmen dan keterlibatan langsung perangkat desa dalam mengajak masyarakat, meski respons masyarakat masih beragam. Dari sisi keadilan, layanan pengelolaan sampah belum dapat dinikmati secara merata karena hanya sebagian warga yang terlayani dengan baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah, diperlukan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan fasilitas, intensifikasi sosialisasi, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pengelolaan Sampah, Kinerja Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah merupakan isu klasik yang masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan lingkungan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga menurunnya kualitas hidup. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 34,21 juta ton sampah dalam setahun. Namun, hanya sekitar 59,7% dari total sampah tersebut yang berhasil dikelola, sementara sisanya sekitar 13,77 juta ton masih belum tertangani dengan baik. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dengan persentase mencapai 37,4% dari keseluruhan timbulan sampah. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengelolaan sampah, terutama di tingkat masyarakat, masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun kelembagaan.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa problematika pengelolaan sampah di Indonesia belum tertangani secara optimal, khususnya pada wilayah pedesaan yang cenderung mengalami keterbatasan dalam hal sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun kelembagaan. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Secara geografis, Desa Lau Tawar merupakan wilayah pedesaan dengan kontur perbukitan dan dominasi lahan pertanian. Masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil, dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Pola kehidupan masyarakat pedesaan yang masih tradisional berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara sistematis dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari penumpukan sampah tersebut.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi sebenarnya telah berupaya melakukan pengelolaan sampah berbasis pelayanan publik. Upaya tersebut antara lain meliputi penyediaan armada pengangkut sampah, pembentukan tim pengelola kebersihan desa, serta pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sederhana di beberapa titik strategis. Namun demikian, menurut hasil wawancara awal dengan beberapa petugas DLH dan perangkat desa, diketahui bahwa armada pengangkut yang tersedia hanya 1 unit truk kecil yang secara operasional belum mampu menjangkau seluruh wilayah dusun di Desa Lau Tawar. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja lapangan juga menjadi kendala serius dalam keberlangsungan program pengelolaan sampah desa.

Bila ditinjau dari sisi kualitas pelayanan publik, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan dasar yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Mengacu pada teori kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Hardiansyah (2011), kinerja pelayanan publik dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu: keandalan

(*Reliability*) konsistensi pelayanan yang dapat diandalkan, daya tanggap (*Responsiveness*) kesigapan dalam merespon keluhan masyarakat, jaminan (*Assurance*) jaminan kepastian pelayanan yang aman dan profesional, empati (*Empathy*) perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, bukti fisik (*Tangibles*) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Lau Tawar, kelima dimensi ini belum berjalan optimal. Misalnya, kurangnya armada (*tangible*), rendahnya daya tanggap petugas lapangan (*responsiveness*), serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah ilegal di lingkungan masyarakat (*reliability* dan *assurance*).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kinerja pelayanan publik dengan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian Fitri & Aini (2021) yang dilakukan di Kota Batu menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Warga enggan mengikuti program pengelolaan sampah jika pelayanan publik yang diberikan tidak konsisten, lambat, atau tidak ramah. Demikian pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Cahyono (2022) di Kabupaten Pangandaran, dikemukakan bahwa pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan publik berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar, keempat faktor ini belum seluruhnya berjalan sinergis. Misalnya, sosialisasi kebijakan masih minim, dana operasional terbatas, komitmen sebagian petugas lapangan

belum optimal, serta koordinasi antar perangkat desa masih lemah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penting dilakukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar. Selain untuk memberikan gambaran empiris, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan strategi peningkatan pelayanan publik berbasis pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2020.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, melalui dinas terkait, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara dan dokumentasi, guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi kebijakan serta realitas di lapangan.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan menitikberatkan pada makna, konteks, dan proses. Maka dari itu, pendekatan ini relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik yang

menyangkut dinamika pelaksana kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam menganalisis kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Lau Tawar, digunakan lima pendekatan teori utama, yaitu teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, teori pelayanan publik, teori kinerja pelayanan publik menurut Hill dan Hupe, serta teori fungsionalisme struktural yang digunakan untuk menilai peran kelembagaan dalam proses pelayanan publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam ruang lingkup administrasi publik, kebijakan publik mencerminkan pilihan-pilihan strategis pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, mengatur hubungan sosial, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Kebijakan ini tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupa program, rencana aksi, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah untuk menjawab isu-isu publik.

Menurut Dye (2013:1), "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do.*"

Artinya, kebijakan publik mencakup segala tindakan maupun keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa ketidakhadiran kebijakan dalam suatu isu pun merupakan sebuah pilihan kebijakan yang memiliki implikasi tertentu.

Sementara itu, Anderson (2014:5) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*"

Dengan demikian, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bersifat sengaja, terarah, dan sistematis, yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah dalam rangka menangani persoalan publik yang dianggap penting.

Secara umum, kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, (2) bersifat mengikat dan berlaku umum, (3) menysasar kepentingan publik, dan (4) disusun melalui proses yang rasional dan bertahap. Karakteristik ini menjadi pembeda antara kebijakan publik dengan kebijakan organisasi atau kebijakan individual.

Menurut Dunn (2018), proses penyusunan kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Perumusan masalah (*problem formulation*),
2. *Agenda setting*,
3. Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*),
4. Pengambilan keputusan kebijakan (*policy adoption*),
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*),
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Setiap tahapan tersebut saling berkesinambungan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, kapasitas birokrasi, serta dinamika sosial masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menjadi titik kritis, karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Kebijakan publik tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi

juga pemerintah daerah, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu bentuk kebijakan publik di tingkat desa adalah pengelolaan sampah, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, dalam realitasnya, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, baik dari segi anggaran, sarana-prasarana, maupun partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, teori kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya di tingkat desa dan kabupaten, dirancang dan diimplementasikan dalam konteks pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya pembangunan lingkungan. Pemahaman terhadap proses dan aktor-aktor dalam kebijakan publik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III

George C. Edwards III pada tahun 1980 memperkenalkan Model Implementasi Kebijakan sebagai salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam studi kebijakan publik. Teori ini muncul dari hasil kajian terhadap berbagai kebijakan pemerintah di Amerika Serikat yang mengalami kegagalan implementasi meskipun sudah dirancang dengan baik. Edwards berpendapat bahwa banyak kebijakan yang tidak mencapai tujuan bukan karena perumusannya salah, tetapi karena proses implementasinya tidak berjalan optimal.

Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan

tahap yang krusial dalam siklus kebijakan, karena menjadi penghubung antara keputusan politik dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan sampai kepada pelaksana dan masyarakat dengan jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Komunikasi ini mencakup penyampaian tujuan, prosedur, peraturan, serta manfaat kebijakan. Apabila komunikasi lemah, kebijakan dapat disalahartikan atau bahkan diabaikan.

Dalam konteks pengelolaan sampah di desa, komunikasi mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pengumpulan sampah, jadwal pengangkutan, larangan membuang sampah sembarangan, hingga penjelasan sanksi. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka, media cetak, atau media digital dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

2. Sumber Daya

Kebijakan tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas fisik. Ketersediaan petugas kebersihan, armada pengangkut, tempat pembuangan sementara (TPS), peralatan pelindung diri, dan anggaran operasional menjadi faktor penting. Kekurangan sumber daya sering kali menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan publik di bidang kebersihan.

Dalam kasus pengelolaan sampah, kekurangan armada atau petugas akan membuat jadwal pengangkutan tidak teratur, yang akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan memengaruhi kualitas kerja mereka. Pelaksana yang memiliki sikap positif, memahami pentingnya kebijakan, dan merasa memiliki tanggung jawab akan bekerja lebih maksimal. Sebaliknya, jika pelaksana bersikap apatis atau tidak memahami manfaat kebijakan, implementasi akan berjalan lambat atau bahkan gagal. Pada pengelolaan sampah, disposisi yang baik terlihat dari petugas yang disiplin mengangkut sampah sesuai jadwal, ramah melayani masyarakat, dan sigap menangani keluhan warga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien memudahkan koordinasi antarunit pelaksana. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan tumpang tindih akan memperlambat proses implementasi. Edwards menekankan pentingnya prosedur kerja yang sederhana, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam konteks pengelolaan sampah desa, struktur birokrasi yang baik memastikan pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat berjalan lancar, sehingga tidak ada kebingungan dalam pelaksanaan.

Kelebihan model ini adalah sifatnya yang sederhana namun komprehensif, sehingga mudah diterapkan untuk menganalisis berbagai jenis kebijakan, termasuk kebijakan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini, Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dipilih sebagai kerangka

analisis utama. Keempat faktor tersebut akan digunakan untuk mengkategorikan dan menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor pendukung dan hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar.

Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam sistem administrasi negara modern, keberadaan pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Sinambela (2018:6), "Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat." Definisi ini menekankan bahwa pelayanan publik tidak semata-mata menyangkut urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah hadir dan berperan dalam menjawab kepentingan warga negara. Pelayanan publik mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga pelayanan administrasi kependudukan dan lingkungan hidup.

Menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain:

1. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan individu tertentu.
2. Disediakan oleh pemerintah atau lembaga resmi.
3. Memiliki standar dan prosedur baku.

4. Dapat diukur kualitasnya melalui respons, kecepatan, kepastian, dan keadilan.

Pelayanan publik yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat beberapa prinsip utama dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Keadilan, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
2. Transparansi, terbuka dan mudah diakses;
3. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan;
4. Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat;
5. Kepastian hukum, pelayanan diberikan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Kualitas, mengutamakan mutu layanan dan kepuasan masyarakat.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu di berbagai sektor, termasuk pengelolaan lingkungan dan sampah.

Di tingkat desa, pelayanan publik memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah desa bertugas memberikan pelayanan dasar kepada warga, termasuk di dalamnya pengelolaan kebersihan lingkungan. Namun, dalam banyak kasus, keterbatasan anggaran, minimnya SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, misalnya, mencakup:

1. Penyediaan sarana tempat sampah,
2. Penjadwalan pengangkutan sampah,
3. Edukasi kebersihan kepada warga,
4. Penanganan akhir sampah.

Jika sistem pelayanan tersebut berjalan dengan baik, maka kualitas lingkungan desa akan meningkat. Namun sebaliknya, bila pelayanan tidak memadai, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, munculnya penyakit, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini, konsep pelayanan publik menjadi penting karena menjadi dasar dalam menilai kinerja pemerintah desa dan instansi terkait dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar. Melalui teori pelayanan publik, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik adalah gambaran tingkat pencapaian hasil kerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, rencana, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Hill dan Hupe (2002), kinerja bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses yang mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya, prosedur, dan interaksi dengan warga untuk memenuhi kebutuhan publik.

Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja pelayanan publik mencakup kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sampah rumah tangga secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Hal ini penting karena pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, estetika desa, dan keberlanjutan ekologi.

Hill dan Hupe (2002) menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik ditandai oleh:

1. Efisiensi

Makna Teori: Pemanfaatan sumber daya (dana, tenaga, waktu, sarana) secara optimal sehingga biaya dan usaha yang dikeluarkan sebanding atau lebih kecil daripada hasil yang diperoleh.

Relevansi ke Skripsi: Pemerintah desa perlu menunjukkan kemampuan meminimalkan biaya pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Misalnya, pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang hemat bahan bakar dan tenaga kerja.

2. Efektivitas

Makna Teori: Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Relevansi ke Skripsi: Apakah program pengelolaan sampah rumah tangga—seperti pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan akhir—benar-benar menurunkan volume sampah yang menumpuk, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Responsivitas

Makna Teori: Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menanggapi aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat.

Relevansi ke Skripsi: Misalnya, pemerintah desa segera menindaklanjuti laporan tumpukan sampah atau menyesuaikan jadwal pengangkutan ketika ada acara besar yang menimbulkan sampah ekstra.

4. Akurasi dan Ketepatan Waktu

Makna Teori: Layanan yang diberikan sesuai standar prosedur, dengan jadwal yang konsisten dan hasil yang dapat diprediksi.

Relevansi ke Skripsi: Truk sampah datang pada waktu yang dijanjikan, data volume sampah dicatat dengan

benar, serta petugas lapangan bekerja sesuai SOP kebersihan.

5. Keadilan (Equity)

Makna Teori: Layanan diberikan secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, lokasi, atau kemampuan ekonomi.

Relevansi ke Skripsi: Seluruh dusun, baik yang dekat dengan pusat desa maupun wilayah pinggiran, memperoleh frekuensi dan kualitas layanan sampah yang sama

i. Teori Good Governance

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam melaksanakan pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2006:92), good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bank Dunia (World Bank, 1992) mendefinisikan good governance sebagai cara otoritas negara menggunakan kewenangannya untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial dalam rangka pembangunan.

Prinsip-Prinsip Good Governance ada beberapa prinsip utama yang sering digunakan:

1. Partisipasi: Masyarakat dilibatkan aktif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program, termasuk dalam pengelolaan sampah.

2. Transparansi: Informasi terkait kebijakan, anggaran, dan hasil kinerja harus terbuka bagi masyarakat.

3. Akuntabilitas: Pemerintah wajib bertanggung jawab atas layanan yang diberikan, termasuk efektivitas pengelolaan sampah.

4. Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan sumber daya dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna.

5. Keadilan (Equity): Setiap warga mendapat pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.
6. Penegakan Hukum (Rule of Law): Kebijakan pengelolaan sampah dijalankan sesuai aturan dan peraturan daerah.

Dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar, teori Good Governance sangat relevan karena, Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah (gotong royong, pemilahan sampah, bank sampah), transparansi dalam penggunaan dana desa untuk sarana prasarana persampahan meningkatkan kepercayaan publik, akuntabilitas terlihat dari sejauh mana pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan publik di bidang lingkungan, efektivitas dan efisiensi menentukan apakah program pengangkutan dan pengolahan sampah dapat berjalan baik dengan keterbatasan sumber daya, keadilan memastikan semua dusun terlayani, bukan hanya wilayah dekat pusat desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah desa yang mencerminkan sejauh mana aparatur mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, pelayanan publik tidak hanya diukur dari adanya aturan atau program formal, melainkan juga dari konsistensi implementasi, kualitas fasilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dapat dikategorikan berada pada tingkat cukup, namun masih jauh dari standar ideal pelayanan publik yang baik.

Dari perspektif masyarakat, kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah masih dipengaruhi

oleh beberapa kondisi. Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dusun di Desa Lau Tawar belum memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang memadai. Akibatnya, warga terpaksa membuang sampah di kebun, sungai, atau membakarnya. Kondisi ini menandakan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Dalam teori pelayanan publik, minimnya sarana prasarana mengakibatkan layanan tidak efisien dan tidak efektif, karena masyarakat tidak memperoleh akses yang merata terhadap fasilitas yang seharusnya disediakan pemerintah desa.

Kedua, konsistensi dalam pelaksanaan program. Warga menyampaikan bahwa jadwal pengangkutan sampah sering kali tidak menentu. Ada kalanya sampah diangkut secara rutin, tetapi di waktu lain dibiarkan menumpuk berhari-hari hingga menimbulkan bau tidak sedap. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek akurasi dan ketepatan waktu, yang menurut Hill dan Hupe (2002) merupakan salah satu indikator pelayanan publik yang baik. Ketidakpastian jadwal juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan, sehingga sebagian warga memilih mengelola sampah secara mandiri meskipun dengan cara yang berisiko, seperti membakar sampah.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melaksanakan gotong royong, intensitas kegiatan ini masih sangat terbatas. Sosialisasi yang jarang dilakukan membuat dampaknya kurang signifikan dalam membangun kesadaran kolektif. Padahal, salah satu indikator responsivitas pelayanan publik adalah

kemampuan pemerintah desa dalam memahami bahwa masalah pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, lemahnya sosialisasi membuat pelayanan publik di bidang ini belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian masyarakat mulai menunjukkan kesadaran untuk ikut menjaga kebersihan melalui kegiatan gotong royong atau tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, kesadaran ini belum merata. Masih banyak warga yang bersikap pasif dan menganggap persoalan sampah bukan tanggung jawab bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif, karena tujuan pelayanan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat belum tercapai secara menyeluruh.

Kelima, keadilan dalam distribusi pelayanan. Beberapa warga menilai bahwa akses terhadap fasilitas kebersihan belum merata antar-dusun. Hal ini menimbulkan kesenjangan pelayanan, di mana dusun yang dekat dengan pusat desa relatif lebih mendapat perhatian, sementara dusun yang letaknya lebih jauh sering terabaikan. Dari sisi teori, ketidakmerataan pelayanan mencerminkan rendahnya aspek equity (keadilan) dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar dapat disimpulkan berada pada tahap cukup berjalan, namun masih menghadapi banyak kelemahan dalam hal sarana prasarana, konsistensi, sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan layanan. Hal ini berarti bahwa meskipun pemerintah desa telah menunjukkan

komitmen, kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan sampah masih jauh dari standar ideal.

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan publik, khususnya di tingkat desa, keberhasilan maupun hambatan tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara faktor struktural, sumber daya, komitmen aparatur, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar dapat dikategorikan ke dalam dua aspek besar, yaitu faktor keberhasilan dan faktor hambatan. Dari faktor keberhasilan. Pertama, adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi desa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Regulasi ini menjadi payung kebijakan yang memungkinkan desa untuk mengalokasikan dana, membentuk program, dan melakukan sosialisasi. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, dukungan regulasi merupakan faktor krusial yang memperkuat aspek efisiensi, karena desa tidak perlu menciptakan aturan baru, melainkan tinggal mengadaptasi kebijakan yang sudah ada.

Kedua, komitmen pemerintah desa. Kepala Desa Lau Tawar bersama perangkatnya rutin mengadakan gotong royong, sosialisasi, dan mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan kebersihan. Komitmen ini mencerminkan adanya kesadaran dari aparatur bahwa persoalan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang penting. Dalam konteks teori Hill dan Hupe (2002), komitmen aparatur desa memperkuat efektivitas pelayanan, karena adanya kepemimpinan yang mendorong tercapainya tujuan layanan.

Ketiga, partisipasi sebagian masyarakat. Walaupun kesadaran belum merata, ada kelompok warga yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, kalangan ibu rumah tangga yang mengikuti kerja bakti, maupun generasi muda yang mulai menegur kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Keterlibatan masyarakat ini menjadi faktor keberhasilan karena tanpa adanya partisipasi publik, kebijakan pengelolaan sampah akan sulit berjalan. Hal ini sesuai dengan aspek responsivitas, karena pelayanan publik dalam pengelolaan sampah melibatkan keterlibatan aktif penerima layanan.

Keempat, adanya dukungan kolaboratif dari instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Walaupun masih terbatas, program edukasi dan pendampingan dari tingkat kabupaten menjadi stimulus tambahan agar desa lebih serius dalam mengelola sampah. Dukungan ini menunjukkan adanya jaringan kerja antar-pemerintah, yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik berbasis kolaborasi.

Selanjutnya faktor hambatan. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak adanya TPS di seluruh dusun dan minimnya armada pengangkut sampah menjadi hambatan utama. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengelola sampah secara tradisional, seperti membakar atau membuang ke sungai. Dalam kerangka teori pelayanan publik, hal ini memperlemah aspek efisiensi dan efektivitas, karena sumber daya yang terbatas tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, minimnya anggaran desa. Dana desa yang tersedia tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk pengelolaan sampah, karena harus dibagi dengan prioritas pembangunan lain. Keterbatasan anggaran ini menjadi faktor struktural yang membatasi ruang gerak pemerintah desa. Kondisi ini

berdampak pada aspek akurasi dan ketepatan waktu, karena layanan tidak bisa diberikan sesuai standar akibat keterbatasan dana.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah di pekarangan, atau enggan ikut serta dalam gotong royong. Faktor perilaku ini menjadi hambatan kultural yang sulit diatasi hanya dengan kebijakan formal. Dalam perspektif pelayanan publik, rendahnya kesadaran masyarakat melemahkan aspek responsivitas, karena layanan yang diberikan tidak sejalan dengan perilaku penerima layanan.

Keempat, kurangnya konsistensi pelaksanaan program. Sosialisasi yang jarang dilakukan dan jadwal pengangkutan sampah yang tidak menentu menunjukkan lemahnya tata kelola pelayanan publik. Inkonsistensi ini berdampak pada aspek akurasi, karena layanan tidak diberikan sesuai standar dan prosedur yang jelas.

Kelima, kurangnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Desa Lau Tawar belum sepenuhnya mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Padahal, persoalan sampah merupakan isu lintas wilayah yang tidak bisa ditangani desa seorang diri. Lemahnya koordinasi ini mencerminkan rendahnya aspek keadilan, karena desa tidak memperoleh dukungan setara dengan kebutuhan riil masyarakatnya.

Hasil penelitian tersebut, jika dianalisis berdasarkan kerangka teori pelayanan publik menurut Hill dan Hupe (2002), maka kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep ideal dengan kondisi di lapangan. Dalam perspektif efisiensi, pelayanan publik yang baik seharusnya mampu

mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk sarana, prasarana, maupun kapasitas aparatur.

Namun realitas di Desa Lau Tawar memperlihatkan bahwa keterbatasan armada pengangkut, minimnya tempat penampungan sementara, serta alokasi anggaran desa yang terbatas menyebabkan pelayanan tidak berjalan secara efisien. Sumber daya yang ada belum mampu menjangkau seluruh dusun secara merata, sehingga masyarakat di wilayah terpencil harus menanggung beban lebih besar dalam mengelola sampah secara mandiri. Ketidakefisienan ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan disparitas pelayanan antar-warga desa.

Dari segi efektivitas, pengelolaan sampah seharusnya mampu mencapai tujuan utama yaitu menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Memang ada perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu, terutama melalui kegiatan gotong royong dan peningkatan kesadaran sebagian warga. Akan tetapi, masih banyak sampah yang menumpuk, dibakar, atau dibuang sembarangan, menandakan bahwa hasil pelayanan belum konsisten dengan tujuan kebijakan. Efektivitas layanan publik akan terwujud jika semua unsur, baik pemerintah desa maupun masyarakat, bergerak secara kolektif dalam satu sistem pengelolaan yang teratur. Fakta bahwa sebagian warga tetap membuang sampah ke sungai atau kebun memperlihatkan bahwa efektivitas layanan masih rendah, karena produk kebijakan tidak terinternalisasi dalam perilaku masyarakat.

Responsivitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan sampah dapat dikatakan sudah mulai terbentuk, meskipun masih terbatas. Hal ini

tampak dari adanya inisiatif penyuluhan, kerja bakti, dan ajakan Kepala Desa untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Namun responsivitas ini belum cukup kuat untuk menanggapi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, karena program yang dijalankan masih bersifat sesekali, bukan berkesinambungan. Padahal, dalam teori Hill dan Hupe, pelayanan publik yang responsif harus menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar sudah mengandung unsur responsivitas, tetapi belum mampu menjawab keluhan utama warga seperti tidak tersedianya TPS, jadwal pengangkutan yang tidak teratur, dan minimnya pendampingan rutin.

Sementara itu, aspek akurasi dan ketepatan waktu juga menjadi persoalan serius. Layanan publik yang baik harus dijalankan dengan standar yang jelas serta ketepatan waktu yang konsisten. Dalam praktik di Desa Lau Tawar, pengangkutan sampah sering tidak menentu, kadang dilakukan sesuai jadwal, kadang terhenti tanpa pemberitahuan. Ketidakpastian ini menimbulkan penumpukan sampah, mengganggu kenyamanan, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akurasi dalam konteks ini bukan hanya soal teknis pengangkutan, tetapi juga mencakup kepastian bahwa pelayanan berjalan sesuai prosedur yang dipahami masyarakat. Ketika jadwal dan prosedur tidak konsisten, maka akurasi pelayanan menjadi lemah, dan hal ini berimplikasi pada rendahnya kepuasan masyarakat.

Terakhir, aspek keadilan dalam pelayanan publik juga belum terwujud sepenuhnya di Desa Lau Tawar. Keadilan dalam arti distribusi pelayanan yang merata tanpa diskriminasi menuntut agar semua dusun memperoleh akses yang sama terhadap

fasilitas pengelolaan sampah. Namun kenyataannya, dusun yang dekat dengan pusat pemerintahan desa relatif lebih mendapatkan perhatian, sementara wilayah yang lebih jauh sering terabaikan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam distribusi pelayanan, sehingga ada kelompok masyarakat yang merasakan manfaat lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi masih berada pada tahap yang berkembang namun belum optimal. Kualitas kinerja dapat terlihat dari adanya inisiatif pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan gotong royong, penyuluhan, serta upaya mengajak masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran membuat efektivitas serta efisiensi pelayanan belum sepenuhnya tercapai.

Layanan pengelolaan sampah juga belum dapat dikatakan akurat dan tepat waktu, sebab tidak ada sistem pengangkutan yang teratur dan fasilitas tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai. Distribusi layanan juga belum merata, sehingga tidak semua masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan yang ada. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar dapat dikategorikan cukup baik dalam aspek komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat, tetapi masih rendah dalam aspek keberlanjutan, ketepatan, dan pemerataan.

Sementara itu, faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah di Desa Lau Tawar terbagi ke dalam dua sisi yang saling berkaitan. Faktor keberhasilan terutama terletak pada budaya gotong royong yang masih kuat, peran aktif pemerintah desa yang memberi teladan, serta kesadaran sebagian masyarakat khususnya generasi muda dalam menjaga kebersihan. Faktor-faktor ini menjadi modal sosial yang berharga untuk mendorong keberlanjutan program.

Namun, faktor penghambat juga cukup signifikan, seperti keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran sebagian warga, lemahnya sistem pengangkutan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten. Hambatan ini mengakibatkan kebijakan pengelolaan sampah sering tidak berjalan efektif di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah di desa ini sangat bergantung pada sinergi antara komitmen pemerintah desa, dukungan masyarakat, dan perhatian dari pemerintah kabupaten. Upaya memperkuat fasilitas, meningkatkan sosialisasi, serta memperluas partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Disdukcapil Kabupaten Dairi. (2019). *Agregat Data Kependudukan Semester II Tahun 2019*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Diakses dari <https://disdukcapil.dairikab.go.id>
- Disdukcapil Kabupaten Dairi. (2022). *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Diakses dari <https://disdukcapil.dairikab.go.id>
- Disdukcapil Kabupaten Dairi. (2023). *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2023*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Kabupaten Dairi. Diakses dari <https://disdukcapil.dairikab.go.id>
Disdukcapil Kabupaten Dairi. (2024). *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Diakses dari <https://disdukcapil.dairikab.go.id>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pemerintah Kabupaten Dairi. (2023). *Profil Kecamatan Tanah Pinem. Sidikalang: Pemkab Dairi*.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.